

# Analisis Kebijakan Jepang Bekerja Sama dengan Myanmar dalam Memenuhi Kepentingan Ekonomi Di Tahun 2011-2019

Putu Indah Savitri<sup>1)</sup>, D.A. Wiwik Dharmiasih<sup>2)</sup>, Putu Titah Kawitri Resen<sup>3)</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: iindahsavitri@gmail.com<sup>1)</sup>, wiwikd@unud.ac.id<sup>2)</sup>, kawitriresen@gmail.com<sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*This research aims to describe Japan's attempts in accomplishing their economic interest through investment in Myanmar by using qualitative method. Japan encounters the declining human resource which causing labour shortage. This phenomenon leads Japan's manufacturers to a major bankruptcy. Through Japan's cooperation with Myanmar, Japan aims to expand their manufacturing companies in Myanmar in order to gain Myanmar's labour force. However, there's a large gap between the skill of Japan and Myanmar's human resource. The researcher uses the concept of Foreign Policy and Infrastructure Investment as the framework. This research perceives that infrastructure investment impacting the skill of human resources and helps the expansion of Japan's manufacturers in Myanmar.*

**Keywords:** Japan, Myanmar, Economy, Infrastructure Investment, Foreign Policy

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pasca Perang Dingin, isu perekonomian kian meningkat setelah menurunnya ketegangan dalam bidang militer secara global (Bergsten, 1990). Boldeanu (2015) menyebutkan terdapat empat faktor penentu utama dalam perkembangan perekonomian, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, modal (*capital*), dan kemajuan teknologi. Surugiu (2015) menyatakan bahwa globalisasi mengakibatkan perekonomian tidak hanya dipengaruhi oleh keempat faktor tersebut, namun juga dipengaruhi oleh pasar. Salah satu negara dengan perekonomian yang baik adalah Jepang.

Jepang merupakan negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia (BBC, 2018). Posisi tersebut diraih Jepang

setelah mengalami perkembangan ekonomi yang begitu pesat pasca kekalahannya pada Perang Dunia II (Takada, 1999). Perkembangan perekonomian Jepang didukung oleh sektor manufaktur. Sektor manufaktur menyumbang 25 persen dari total GDP Jepang (World Bank dalam Macro Economy Meter, n.d.). Oleh karenanya, industri manufaktur menjadi industri unggulan Jepang dalam perdagangan internasional.

Industri manufaktur merupakan industri yang melibatkan berbagai faktor ekonomi. Adapun yang dilakukan dalam industri ini adalah mengubah bahan mentah menjadi barang jadi (Spacey, 2019). Faktor-faktor yang terlibat dalam industri ini adalah tenaga kerja, teknologi, dan mesin (Economy Watch, 2010; Spacey, 2019). Walaupun Jepang memiliki citra akan kemajuan teknologinya, industri manufaktur

tetap memerlukan keterlibatan sumber daya manusia (SDM) dalam pengoperasiannya sebagai tenaga kerja. Sehingga, SDM menjadi aspek yang krusial dalam menunjang keberlangsungan industri manufaktur.

Perekonomian Jepang yang kuat juga didukung oleh tenaga kerja yang kompeten. *Asialink Business* (2016) menyatakan bahwa kemajuan ekonomi Jepang didukung oleh kualitas pelayanan yang baik. Hal itu juga ditunjang oleh kualitas SDM yang mendukung. Kualitas SDM milik Jepang menempati posisi kedua setelah Hong Kong (Japan Times, 2018). *United Nations Development Program* (UNDP) (2018) menyebutkan bahwa kualitas SDM Jepang terukur melalui tingginya pendidikan, kualitas hidup sehat dan angka harapan hidup, serta standar kehidupan. Salah satu dampak dari tingginya angka harapan hidup di Jepang adalah meningkatnya populasi lansia di Jepang tiap tahunnya (VOX, 2018).

Peningkatan populasi lansia di Jepang memengaruhi jumlah populasi produktif di negara tersebut. Para pekerja di Jepang memasuki masa pensiun ketika mereka menginjak usia 60-65 tahun (HRM Asia, 2018; Reuters, 2019). Ketika memasuki usia pensiun, para pekerja akan meninggalkan pekerjaannya dan menerima uang pensiun. Bertambahnya populasi lansia dari tahun ke tahun juga didukung oleh angka harapan hidup Jepang yang kian meningkat. Sayangnya, peningkatan jumlah lansia tidak diikuti oleh peningkatan populasi usia produktif. Implikasi yang

diakibatkan oleh berkurangnya populasi berusia produktif adalah menurunnya jumlah tenaga kerja.

Tenaga kerja yang berkurang memberikan pengaruh secara langsung pada menurunnya tingkat produktivitas Jepang. Perusahaan Panasonic yang merupakan perusahaan ternama dalam industri manufaktur milik Jepang menutup dua dari tiga pabrik yang dimiliki (Fackler, 2012). Melalui artikelnya, Fackler (2012) menyatakan bahwa hal ini disebabkan oleh tiga faktor, yaitu ketatnya persaingan dengan negara lain, meningkatnya nilai mata uang yen, serta terjadinya penurunan tenaga kerja di Jepang. Panasonic bukanlah satu-satunya perusahaan Jepang yang mengalami penurunan dalam produktivitasnya. *Tokyo Shoko Research* dalam *Nikkei Asian* (2019) menyatakan bahwa terdapat 362 perusahaan Jepang yang mengalami kebangkrutan. Perusahaan yang mengalami penutupan mengakibatkan perekonomian Jepang mengalami penurunan. Acuan dari melemahnya perekonomian Jepang dapat terlihat dari GDP Jepang yang selalu menurun, terutama sejak tahun 2010 (Trading Economics, 2019; Reuters, 2018). Penurunan yang terjadi secara konstan mengakibatkan Jepang yang mulanya berada pada posisi kedua terbesar di dunia, kini menjadi peringkat ketiga sebagai perekonomian terbesar di dunia (BBC, 2011; Guardian, 2011).

Jepang kemudian berupaya untuk menghentikan penurunan perekonomian yang terjadi. Upaya yang dilakukan oleh

Jepang tercermin pada kebijakan Jepang dalam membuka kerja sama internasional (Government of Japan, 2011). Tahun 2012, Shinzo Abe, selaku Perdana Menteri Jepang, menetapkan kebijakan *Abenomics* dalam mengatasi isu perekonomian Jepang (Government of Japan, 2019). Cakupan kebijakan *Abenomics* tidak hanya dalam ranah domestik, namun juga ranah internasional. Kebijakan *Abenomics* menempatkan kerja sama luar negeri sebagai salah satu kebijakan prioritas. Salah satu negara yang menjadi sasaran kebijakan luar negeri Jepang sejak tahun 2011 adalah Myanmar (Government of Japan, 2011).

Kerja sama yang dilakukan oleh Jepang dan Myanmar diproyeksikan dapat memberi akses pada perusahaan swasta milik Jepang untuk melakukan ekspansi. Jepang bertujuan untuk mengembangkan perusahaan swastanya di Myanmar (Government of Japan, 2012). Uniknya, Myanmar merupakan negara yang sedang mengalami ketidakstabilan secara ekonomi dan politik. Myanmar diberikan berbagai sanksi ekonomi oleh negara-negara Barat, seperti Uni Eropa maupun Amerika Serikat (New York Times, 2018; Heijmans, 2019). Selain itu, Jepang dan Myanmar pun memiliki kesenjangan dalam kualitas SDM yang dapat dilihat berdasarkan *Human Development Index* yang mana Jepang berada dalam 20 besar sedangkan Myanmar berada di peringkat 148 (UNDP, 2018). Berdasarkan *Human Capital Index*, Jepang berada di peringkat kedua dan Myanmar berada di peringkat 107 (World

Bank, 2018). Kualitas sumber daya manusia Jepang memiliki kualifikasi yang tinggi berdasarkan laporan UNDP (2018). Hal ini bertolak belakang dengan kondisi Myanmar. Tanaka dalam *Asian Development Bank* (2015) menuliskan bahwa kualitas SDM milik Myanmar masih memerlukan peningkatan. Adapun indikator yang digunakan dalam menilai kualitas SDM yang dimiliki oleh Myanmar adalah rendahnya pencapaian pendidikan masyarakat Myanmar (Asian Development Bank, 2015). Walaupun demikian, Jepang tetap dengan gencar melakukan kerja sama dengan Myanmar.

Kebijakan Jepang untuk tetap melakukan kerja sama luar negeri dengan Myanmar merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Jepang tetap melakukan kerja sama luar negeri dengan negara yang mendapat kecaman internasional dalam bentuk sanksi ekonomi. Selain itu, kebutuhan Jepang akan SDM bertolak belakang dengan Myanmar yang masih memerlukan peningkatan kualitas pada SDM yang dimiliki. Tahun 2017, Jepang tercatat terlibat dalam 36 dari 82 perusahaan yang melakukan investasi di Myanmar. Hal ini yang kemudian membuat Peneliti tertarik untuk melihat melihat bagaimana Jepang dapat memenuhi kepentingan ekonominya melalui kerja sama luar negeri dengan Myanmar. Berdasarkan latar belakang tersebut, Peneliti kemudian mempertanyakan mengenai bagaimana Jepang dapat memenuhi kepentingan

ekonominya melalui kerja sama dengan Myanmar di tahun 2011-2019.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Peneliti menggunakan tiga literatur dalam tulisan ini. Literatur yang pertama merupakan literatur karya Naohiro Ogawa (2011) yang berjudul *Population Aging and Immigration in Japan*. Tulisan ini membantu Peneliti dalam menggambarkan situasi perekonomian Jepang yang dipengaruhi oleh penurunan populasi berusia produktif. Solusi yang tercantum dalam tulisan Ogawa (2011) kemudian dielaborasi lebih lanjut pada literatur kedua karya B. Srinivasu dan P. Srinivasa Rao (2013) yang berjudul *Infrastructure Development and Economic growth: Prospects and Perspective*.

Tulisan milik Srinivasu (2013) berkontribusi dalam memberikan konsep investasi infrastruktur pada Peneliti guna menganalisis solusi Jepang. Mengacu pada pernyataan dalam tulisan milik Ogawa (2011) investasi infrastruktur merupakan salah satu solusi yang digunakan untuk menanggulangi permasalahan perekonomiannya. Srinivasu (2013) memaparkan analisis berupa perkembangan perekonomian yang terjadi di salah satu wilayah di India pasca pemberian investasi infrastruktur. Wilayah tersebut kemudian dibandingkan dengan wilayah lainnya yang tidak menerima investasi dan kemudian menunjukkan hasil bahwa wilayah penerima investasi infrastruktur memiliki perkembangan perekonomian yang lebih pesat.

Tulisan Srinivasu (2013) menggambarkan pengaruh investasi infrastruktur secara domestik. Oleh karena itu, guna menggambarkan pengaruh investasi antar negara, Peneliti menggunakan tulisan milik Edward H. Sandy (2013) yang berjudul *China-Africa Cooperation-An outstanding relationship Built on Mutual Respect and Common Benefits: A Review*.

Sandy (2013) dalam tulisannya memaparkan kebutuhan Tiongkok yang kian meningkat akibat perekonomiannya yang meningkat. Posisi Tiongkok yang merebut peringkat Jepang sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia, mengakibatkan Tiongkok memerlukan sumber daya alam (SDA) dengan kapasitas yang lebih tinggi untuk menunjang kegiatan produksinya. Tiongkok tidak dapat memenuhi kebutuhan SDA apabila hanya bertumpu pada SDA yang dihasilkan oleh negaranya. Sehingga, Tiongkok melakukan investasi infrastruktur di Afrika.

Tulisan ini membantu Peneliti dalam melihat konsep kebijakan luar negeri berupa investasi yang menguntungkan negara pemberi investasi dan penerima investasi. Tiongkok berhasil memenuhi kepentingan nasionalnya dalam mendapatkan SDA. Afrika sebagai penerima investasi infrastruktur Tiongkok juga mendapatkan keuntungan berupa peningkatan fasilitas-fasilitas yang menunjang perkembangan perekonomian Afrika, serta meningkatnya kualitas SDM di Afrika. Melalui kerja sama luar negeri

berupa investasi infrastruktur, kedua negara memperoleh keuntungan nasional masing-masing.

### **Kerangka Pemikiran**

Peneliti menggunakan konsep kebijakan luar negeri yang mencakup Kerja Sama Luar Negeri dan Investasi yang didapat melalui Tinjauan Pustaka untuk menjawab Rumusan Masalah. Kebijakan Luar Negeri merupakan keputusan serta tindakan pemerintah yang dibentuk oleh tujuan maupun tindakan yang menyangkut urusan eksternal dan berhubungan dengan negara-negara asing (Sorensen, 2013). Adapun salah satu bentuk kebijakan luar negeri adalah Kerja Sama Luar Negeri.

Sandy (2013) melalui tulisannya, mendefinisikan kerja sama luar negeri sebagai upaya suatu negara memenuhi kepentingan nasionalnya dengan membuat kesepakatan dengan negara lain. Kepentingan yang tercantum dalam tulisan milik Sandy (2013) merupakan kepentingan ekonomi. Sehingga, terjalin sebuah kerja sama yang saling menguntungkan antar kedua pihak. Asumsi pertama mengenai kerja sama adalah masing-masing aktor memiliki tujuan masing-masing yang ingin dicapai. Tujuan yang dimiliki oleh masing-masing aktor tidak harus sama, melainkan dapat saling melengkapi dan rasional. Asumsi kedua adalah kerja sama dipercaya dapat memberikan timbal balik berupa keuntungan bagi masing-masing aktor. Kedua asumsi tersebut yang kemudian membentuk suatu kerja sama (Milner,

1992). Investasi merupakan salah satu kerja sama yang dilakukan oleh Jepang kepada Myanmar. Sehingga, Peneliti menggunakan konsep investasi untuk menjawab Rumusan Masalah.

Investasi merupakan salah satu bentuk perpindahan modal (*capital*) menuju negara berkembang yang kemudian menjadi tonggak pertumbuhan ekonomi (Sarfriz dan Liu, 2015). Salah satu bentuk dari investasi yang dimaksud adalah investasi infrastruktur yang merupakan *Social Overhead Capital* (SOC). Menurut Hirschman dalam Srinivasu dan Rao (2013), infrastruktur juga mencakup jalur komunikasi serta akses terhadap kesehatan, tidak hanya mengenai transportasi maupun air. Kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut yang kemudian akan mendorong terjadinya perkembangan ekonomi. Terdapat tiga jenis hubungan dalam investasi infrastruktur menurut Srinivasu dan Rao (2013), yaitu:

1. Hubungan antara sumber daya dengan pabrik;
2. Hubungan antara masyarakat dengan pekerjaan;
3. Hubungan antara produk dengan pasar.

Ketiga hubungan tersebut dapat digunakan untuk menganalisis kepentingan negara yang melakukan investasi terhadap negara tujuannya.

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Suryabrata (2014) menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menjabarkan situasi ataupun kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. Adapun teknik pengumpulan data didapatkan dari sumber berita, situs-situs pemerintah, serta jurnal maupun literatur yang relevan dengan penelitian dengan sumber data sekunder. Tingkat analisis yang Peneliti gunakan adalah tingkat analisis negara. Penelitian pada tingkat negara memiliki keterkaitan yang erat dengan kebijakan yang dibuat oleh suatu negara dalam mengakomodir isu-isu tertentu (Mas'ood, 1989).

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Jepang dan Isu Perekonomian**

Industri manufaktur memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian Jepang. Sebesar 61,4 persen dari ekspor Jepang merupakan produk hasil dari industri manufaktur (World's Top Exports, 2019). Menurut *Harvard Business Review* (2019), industri manufaktur merupakan industri yang paling membutuhkan tenaga kerja terampil. Industri manufaktur Jepang yang besar didukung oleh SDM yang berkualitas. UNDP menggunakan *Human Development Index* (HDI) dalam mengukur kualitas SDM. Adapun tiga indikator yang digunakan sebagai acuan dalam HDI, yaitu kualitas hidup sehat dan panjangnya usia, standar kehidupan, serta pendidikan. Jepang menduduki peringkat unggul dalam

ketiga indikator tersebut apabila dibandingkan dengan negara lainnya (UNDP, 2018).

Perekonomian Jepang mengalami permasalahan pasca menurunnya jumlah populasi yang berada di usia produktif. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kelangkaan tenaga kerja. Kelangkaan tenaga kerja yang terjadi di Jepang memberikan implikasi yang signifikan terhadap berbagai perusahaan terutama di bidang manufaktur. Perusahaan-perusahaan manufaktur Jepang mengalami kesulitan untuk merekrut pekerja baru dengan keterampilan yang sesuai, serta terjadi pelonjakan upah tenaga kerja akibat ketersediaannya yang menurun.

*Tokyo Shoko Research* dalam *Nikkei Asian* (2019) menuliskan bahwa terdapat 362 perusahaan telah mengalami kebangkrutan. Nippon (2019) menyatakan bahwa 59 kebangkrutan diakibatkan oleh kesulitan perusahaan dalam merekrut pekerja, 278 kebangkrutan diakibatkan oleh tidak adanya penerus dalam suatu perusahaan, dan sisanya diakibatkan oleh alasan lain, seperti ketidakmampuan suatu perusahaan dalam menggaji tenaga kerja dengan upah yang meningkat. Selain mengalami permasalahan akibat kelangkaan tenaga kerja, Jepang juga mengalami permasalahan terhadap pasar dari hasil manufaktur otomotifnya.

Permasalahan yang melanda sektor manufaktur Jepang tidak hanya diakibatkan oleh penurunan tenaga kerja. *Euronews* (2019) menyatakan bahwa

dalam kurun lebih dari satu dekade, manufaktur otomotif Jepang mengalami penurunan penjualan di kawasan Eropa (Reuters, 2012), khususnya Inggris yang mengalami penurunan signifikan di tahun 2011 dan tahun 2012 (BBC, 2019).

Permasalahan pasar yang dihadapi oleh Jepang tidak hanya terjadi di kawasan Eropa. Manufaktur Jepang juga mengalami kesulitan dalam melakukan ekspor komoditas manufakturnya untuk menembus pasar Amerika Serikat. Kendala yang dihadapi oleh Jepang guna menembus pasar Amerika Serikat diakibatkan oleh kebijakan Amerika Serikat dalam meningkatkan pajak mobil yang diimpor melalui Eropa (Euronews, 2019). Kendala-kendala tersebut memperlihatkan bahwa Jepang mulai kehilangan pasarnya di wilayah Eropa dan Amerika Serikat. Hal ini mengakibatkan Honda, sebagai salah satu perusahaan manufaktur otomotif ternama Jepang, menutup industri manufakturnya di Inggris (Euronews, 2019).

Kelangkaan tenaga kerja serta kendala Jepang dalam menembus pasar berkontribusi pada menurunnya perekonomian Jepang, yang semula berada dalam peringkat kedua sebagai negara dengan perekonomian terbesar, kini berubah menjadi negara ketiga dengan perekonomian terbesar di dunia, berdasarkan oleh GDP negara. Permasalahan perekonomian yang dihadapi kemudian membuat Pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan kerja sama luar negeri di bidang perekonomian melalui investasi dengan Myanmar.

## **Kerja Sama Jepang Dengan Myanmar**

Jepang dan Burma sempat memiliki kerja sama perekonomian yang erat pasca pendudukan Jepang di Burma. Kedekatan Jepang dengan Burma dibuktikan melalui kedudukan Jepang sebagai mitra dagang terbesar Burma pada tahun 1980 hingga 1984 (Saito, 1999). Hubungan tersebut mengalami kerenggangan akibat berkuasanya militer pada tahun 1988, yang memutuskan kerja sama Jepang dan Myanmar, terutama kerja sama dagang. Sejak tahun 1988 hingga berakhirnya kekuasaan militer di Burma yang telah berganti nama menjadi Myanmar, hubungan antara Jepang dengan Myanmar terkesan stagnan (Hartley, 1998). Hubungan kerja sama Jepang dan Myanmar membaik setelah terjadinya pergantian rezim di Myanmar di tahun 2011 yang ditandai oleh kunjungan Makiko Kikuta, selaku wakil dari Menteri Luar Negeri Jepang, menuju Myanmar. Makiko Kikuta seperti dikutip dalam MOFA (2011) menyampaikan melalui kunjungannya bahwa Jepang menginginkan untuk membantu Myanmar dalam upayanya mengembangkan sistem pasar ekonomi. Hal ini yang kemudian menjadi langkah awal terbentuknya kerja sama antara Jepang dengan Myanmar.

Kunjungan berikutnya pada tahun yang sama dilakukan oleh Perdana Menteri Jepang dan Presiden Myanmar (MOFA, 2011). Perdana Menteri Jepang dan

Presiden Myanmar membentuk sebuah kesepakatan guna memperlancar proses pembangunan Myanmar di tahun 2011. Kesepakatan tersebut berisikan tiga tingkat persetujuan (Hartley, 2018). Pertama, adalah pinjaman untuk melunasi hutang Myanmar yang terakumulasi sebelum tahun 2003. Tingkat persetujuan yang kedua adalah pembebasan Myanmar dari hutang yang terakumulasi setelah tahun 2003. Tingkat terakhir dari persetujuan tersebut adalah pembebasan Myanmar dari biaya jatuh tempo akibat penundaan Myanmar dalam membayar hutang selama dua puluh tahun. Kesepakatan ini diciptakan guna mempermudah Myanmar dalam melakukan pinjaman lainnya kepada Jepang. Pada akhirnya, kesepakatan tersebut diresmikan oleh Jepang dan Myanmar pada pertemuan antara kedua negara di tahun 2012 dan diberlakukan di tahun 2013 (Hartley, 2018; MOFA, 2013).

Kerja sama Jepang dengan Myanmar menghasilkan beberapa dokumen yang dikeluarkan sebagai penanda kerja sama pada tahun 2012 (MOFA, 2012). *Memorandum of Intent* (MOI) terkait kerja sama Jepang dengan Myanmar pada *master plan* proyek pengembangan Pelabuhan Thilawa merupakan salah satu dokumen yang diresmikan dalam pertemuan tersebut. MOI yang dikeluarkan sebagai peresmian kerja sama antara Jepang dengan Myanmar membuka peluang bisnis bagi perusahaan manufaktur Jepang. Tahun 2013, Shinzo Abe dan Aung San Suu Kyi melakukan pertemuan serta menghasilkan kebijakan

mengenai investasi (MOFA, 2013). Kedua tokoh negara tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa melalui investasi yang dilakukan oleh perusahaan swasta Jepang akan mendorong terjadinya pembukaan lahan kerja bagi penduduk Myanmar.

Tahun-tahun berikutnya, Jepang masih dengan gencar melakukan investasi infrastruktur di Myanmar, seperti melakukan investasi pada infrastruktur pendidikan, hingga energi. Upaya Jepang menampakkan hasil sejak tahun 2016 yang dibuktikan melalui 39 perusahaan Jepang telah mulai menjalankan bisnis mereka di daerah Thilawa, hingga peresmian bank-bank milik Jepang yang bertujuan untuk menunjang perkembangan sektor manufaktur Jepang di Myanmar (MOFA, 2016). *Terminal container*, yang juga merupakan proyek milik Jepang di Pelabuhan Thilawa telah rampung di bulan Desember dan siap beroperasi di tahun 2019 (Nikkei Asian, 2018).

### **Investasi Jepang Di Myanmar Sebagai Pemenuhan Kepentingan Ekonomi Tahun 2011-2019**

Kerja sama yang dijalin Jepang dengan Myanmar merupakan salah satu upaya negara tersebut dalam menjaga keberlangsungan industri manufakturnya. Adapun keberlangsungan industri manufaktur Jepang dipengaruhi oleh tiga hubungan yang terbentuk melalui investasi infrastruktur, sesuai dengan konsep yang disampaikan oleh Srinivasu (2013).

## Optimalisasi Sumber Daya

Hubungan antara Jepang dan Myanmar yang telah membaik berhasil memberikan lokasi investasi yang menyediakan SDM kepada perusahaan-perusahaan Jepang. Akan tetapi, perusahaan-perusahaan Jepang membutuhkan dorongan untuk melakukan investasi di Myanmar. Upaya Jepang secara domestik adalah implementasi kebijakan *Abenomics* yang ditujukan kepada perusahaan-perusahaan Jepang berupa keringanan pajak sebesar 500 juta Yen kepada perusahaan yang melakukan *capital expenditure* (South China Morning Post, 2013). Kebijakan ini berhasil meningkatkan investasi perusahaan Jepang di Asia sebesar 22 persen.

Kebijakan *Abenomics* yang diberlakukan Jepang kepada perusahaan-perusahaan di dalam negaranya merupakan kebijakan domestik. Secara internasional, Jepang berhasil bernegosiasi dengan Myanmar untuk memberikan keringanan pajak pada perusahaan yang akan berinvestasi di Myanmar selama lima hingga tujuh tahun. Keberhasilan Jepang dalam mendorong perusahaan negaranya untuk berinvestasi di Myanmar ditunjukkan oleh 36 dari 82 perusahaan yang melakukan investasi di *Thilawa Special Economic Zone* adalah perusahaan Jepang (Thilawa Special Economic Zone Management Committee, 2018). Keberhasilan ini menunjukkan keberhasilan

Jepang dalam menghubungkan sumber daya dengan pabrik.

## Peningkatan Kualitas SDM

Jepang dan Myanmar menganggap bahwa pendidikan merupakan aspek yang krusial dalam menunjang perkembangan Myanmar (Myanmar Times, 2017). Perusahaan manufaktur Jepang yang membutuhkan SDM terampil memfasilitasi infrastruktur pendidikan di Myanmar berikut dengan tenaga pengajarnya. Tindakan tersebut bertujuan untuk membentuk SDM Myanmar yang terampil dalam berpikir kritis. Hal ini digambarkan dalam keterlibatan Jepang membentuk kurikulum pendidikan baru di Myanmar, pelatihan kepada tenaga pengajar, dan peningkatan fasilitas belajar pada dua universitas teknologi di Yangon dan Mandalay sejak tahun 2013 (Embassy of Japan in Myanmar, 2017; Min, 2017).

Shinzo Abe menyatakan Jepang akan memberikan bantuan sebesar 125 milyar Yen dan pendidikan Bahasa Jepang melalui pelatihan yang diberikan kepada guru-guru di Myanmar (MOFA, 2017). Pentingnya pendidikan Bahasa Jepang yang diberikan pada masyarakat Myanmar adalah untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja Myanmar dalam berkomunikasi, khususnya apabila bekerja dengan perusahaan Jepang.

Upaya Jepang dalam menghasilkan SDM terampil menunjukkan peningkatan yang signifikan. Angka

partisipasi tenaga kerja Myanmar pada sektor industri meningkat menjadi 16,58% di tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2011 yang berada pada kisaran 15,5% (Trading Economics, 2019). Peningkatan angka partisipasi tenaga kerja Myanmar pada sektor industri terjadi setelah 35 perusahaan Jepang dengan resmi beroperasi di Myanmar, dan sebanyak 21 perusahaan bergerak dalam industri manufaktur. Hubungan antara masyarakat dengan pekerjaan yang terdapat dalam Konsep Investasi oleh Srinivasu dan Rao (2013) terimplementasikan akibat investasi Jepang pada infrastruktur pendidikan Myanmar.

### **Bank Asing dalam Industri Manufaktur**

Tahun 2014, Myanmar menyatakan persetujuannya dan memberikan izin lisensi pada tiga bank milik Jepang untuk beroperasi di Myanmar setelah penghapusan hutang-hutang Myanmar kepada Jepang serta komitmen yang ditunjukkan oleh Jepang pada kemajuan perekonomian Myanmar (MOFA, 2013; The Diplomat, 2014). *Sumitomo Mitsui Banking Corp.* (SMBC) dan *Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ* (MUFG) merupakan dua bank asing pertama yang beroperasi di Myanmar, setelah beberapa dekade dalam Junta Militer (Wall Street Journal, 2015; The Business Times, 2015; Myanmar Times, 2019).

Bank asing milik Jepang di Myanmar tidak hanya memiliki kemampuan

dalam memberikan pinjaman dalam pembangunan perusahaan, namun juga memiliki peran dalam memfasilitasi perdagangan internasional, terutama yang melibatkan perdagangan dengan mata uang asing (MUFG Bank, 2019). Oleh karena itu, upaya Jepang dalam memperoleh lisensi bank di Myanmar tidak hanya memberikan akses kepada perusahaan Jepang untuk melakukan ekspansi, namun juga memberikan akses pasar kepada hasil dari perusahaan manufaktur Jepang yang berada di Myanmar. Salah satu akses pasar dalam perdagangan internasional yang dapat diperoleh melalui Myanmar adalah akses pada pasar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Ekspansi manufaktur Jepang menuju Myanmar tidak hanya memberikan akses kepada Jepang untuk memasarkan komoditasnya di pasar tunggal ASEAN. Jepang juga memanfaatkan Myanmar sebagai destinasi pasar dari hasil produksi manufakturnya. Akses yang didapatkan oleh industri manufaktur Jepang terhadap pasar melalui Myanmar merupakan wujud nyata dari hubungan antara produk dengan pasar dalam Konsep Investasi Srinivasu dan Rao (2013).

Keberhasilan investasi Jepang, selain dapat diukur melalui banyaknya perusahaan manufaktur yang berhasil dibuka di Myanmar, juga dapat dilihat melalui peningkatan GDP Jepang. Pada kuartal pertama tahun 2019, Jepang mengalami kenaikan GDP sebesar 2,1 persen (New York Times, 2019). Kenaikan GDP Jepang disambut dengan positif oleh

masyarakat negara tersebut setelah mengalami stagnasi selama nyaris dua dekade. CNN (2019) memuat pernyataan bahwa peningkatan GDP yang dialami oleh Jepang merupakan implikasi dari investasi negara tersebut. Upaya Jepang dalam melakukan ekspansi manufakturnya melalui investasi tidak hanya memperlihatkan keberhasilan Jepang dalam mendirikan pabrik-pabrik manufakturnya di Myanmar. Jepang berhasil memanfaatkan segala potensi yang dimiliki oleh Myanmar untuk keberlangsungan manufakturnya secara berkelanjutan.

## 5. KESIMPULAN

Jepang mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh Myanmar melalui investasinya untuk mencapai kepentingan perekonomian Jepang. Adapun cara yang ditempuh oleh Jepang untuk mencapai kepentingan ekonominya melalui investasi adalah: 1) Investasi pada infrastruktur energi Myanmar dimanfaatkan oleh Jepang untuk menghubungkan perusahaan manufakturnya pada SDM yang tersedia di Myanmar. 2) Investasi pada infrastruktur pendidikan berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM Myanmar yang kemudian dimanfaatkan oleh Jepang sebagai tenaga kerja pada perusahaan-perusahaan manufakturnya yang berkembang di Myanmar. 3) Investasi pada infrastruktur lainnya digunakan oleh Jepang sebagai alat bernegosiasi untuk mendapatkan lisensi bank dan memperoleh akses menuju pasar tunggal ASEAN dan domestik Myanmar. Melalui investasi-

investasi yang ditanamkan oleh Jepang pada Myanmar, Jepang berhasil melakukan ekspansi industri manufakturnya dan meningkatkan GDP yang sempat mengalami penurunan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Jackson, Robert & Georg Sorensen. (2013). *Pengantar Studi Hubungan Internasional Edisi Kelima*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset; Limited;
- Mas'ood, Mohtar. (1998). *Perspektif Ekonomi Politik dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.;

### E-Book:

- Saito, Teruko. (1999). *Statistics on the Burmese Economy: The 19th and 20th Centuries*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies.
- Sarfraz, Muddassar dan Shuangqin Liu. (2015). *Influence of Foreign Direct Investment on Gross Domestic Product; an Empirical Study of Pakistan*. Nanjing: Science Publications.

### Jurnal:

- Boldeanu, Florin T. & Liliana Constantinescu. (2015). *The Main Determinants Affecting Economic Growth*. [diakses pada 25 April 2019];
- Hartley, Ryan. (1998). *The Evolution of Japan-Myanmar Relations since 1988*. [diakses pada 6 Juli 2019];
- Milner, Helen. (1992). *International Theories of Cooperation among*

- Nations: Strengths and Weaknesses Cooperation among Nations. Review by: Helen Milner.* [diakses pada 29 Juni 2019];
- Ogawa, Naohiro. (2011). *Population Aging and Immigration in Japan.* Dari *Asian and Pacific Migration Journal*, Vol. 20, No. 2. [diakses pada 14 April 2019];
- Sandy, Edward H. (2013). *China-Africa Cooperation—An Outstanding Relationship Built on Mutual Respect and Common Benefits: A Review.* [diakses pada 5 Juli 2019];
- Srinivasu dan P. Srinivasa Rao. (2013). *Infrastructure Development and Economic growth: Prospects and Perspective.* Dari *Journal of Business Management & Social Sciences Research*, Vol. 2, No. 1. [diakses pada 14 April 2019];
- Takada, Masahiro. (1999). *Japan's Economic Miracle: Underlying Factors and Strategies for the Growth.* [diakses pada 14 April 2019];
- Situs:**
- Bergsten, C. Fred. (1990). *The World Economy After the Cold War.* [diakses pada 19 Maret 2019];
- Harvard Business Review. (2019). *Ranking Countries and Industries by Tech, Data, and Business Skills.* [diakses pada 20 Juli 2019];
- MUFG Bank. (2019). *Trade Finance.* [diakses pada 16 Agustus 2019];
- Myanmar Government. (2019). *Geographic Advantage.* [diakses pada 23 Juli 2019];
- Macro Economy Meter. (n.d.). *Japan: GDP Composition Breakdown.* [diakses pada 23 Juli 2019];
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2011). *Visit by Parliamentary Vice-Minister for Foreign Affairs Makiko Kikuta to Myanmar.* [diakses pada 28 Juni 2019];
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2011). *Visit to Japan by H.E. Mr. Wunna Maung Lwin, Minister for Foreign Affairs of the Republic of the Union of Myanmar (Summary).* [diakses pada 28 Juni 2019];
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2011). *Visit to Myanmar by Mr. Koichiro Gemba, Minister for Foreign Affairs of Japan (Summary).* [diakses pada 28 Juni 2019];
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2012). *Exchange of Notes for Grant Aid for the Republic of the Union of Myanmar ("Project for Mangrove Rehabilitation Plan for Enhancement of Disaster Prevention in Ayeyawady Delta" and "Project for Human Resource Development Scholarship").* [diakses pada 28 Juni 2019];
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2012). *Japan Myanmar Summit Meeting.* [diakses pada 28 Juni 2019];
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2013). *Courtesy Call on Prime Minister Shinzo Abe by Hon. Ms. Aung San Suu Kyi, Chairperson of Myanmar's National League for Democracy.* [diakses pada 29 Juni 2019];
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2013). *Debt-Relief Measure for Myanmar.* [diakses pada 29 Juni 2019];
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2013). *Exchange of Notes concerning Grant Aid to Myanmar.* [diakses pada 29 Juni 2019];
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2014). *Foreign Minister Kishida's Attendance at ASEAN-related Foreign Ministers' Meetings, and Visit to Indonesia.* [diakses pada 29 Juni 2019];
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2015). *Statement by Yohei Sasakawa, Special Envoy of the Government*

- of Japan for National Reconciliation in Myanmar, on the Myanmar Ceasefire Agreement.* [diakses pada 20 Januari 2019];
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2016). *Foreign Minister Kishida Meets with State Counselor and Foreign Minister of Myanmar.* [diakses pada 29 Juni 2019];
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2016). *Meeting Between Prime Minister Abe and the State Counsellor of Myanmar.* [diakses pada 29 Juni 2019];
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2017). *Meeting Between Prime Minister Abe and Myanmar State Counsellor Aung San Suu Kyi.* [diakses pada 29 Juni 2019];
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2017). *Prime Minister Shinzo Abe Meets with the President of Myanmar.* [diakses pada 29 Juni 2019];
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2018). *Prime Minister Abe Meets with the State Counsellor of Myanmar.* [diakses pada 29 Juni 2019];
- Thilawa Special Economic Zone. (2018). *List of Approved Investors.* [diakses pada 25 Juni 2019];
- Trading Economics. (2019). *Japan Labor Force Participation Rate.* [diakses pada 23 Juli 2019];
- Trading Economics. (2019). *Myanmar - Employment in Industry.* [diakses pada 1 Agustus 2019];
- UNDP. (2018). *Human Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update.* [diakses pada 1 April 2019];
- World Bank. (2018). *Human Capital Index and Components, 2018.* [diakses pada 23 Juli 2019];
- World's Top Exports. (2019). *Japan's Top 10 Exports.* [diakses pada 19 Juli 2019];
- Media Massa:
- Asialinks Business. (2016). *Japan's Economy* [Diakses pada 1 April 2019];
- BBC. (2018). *Japan Country Profile.* [diakses pada: 1 April 2019];
- BBC. (2019). *Car Industry: What's behind recent closures?* [Diakses pada 4 Oktober 2019]
- Business Times. (2015). *First Foreign Bank in Decades Opens in Myanmar.* [diakses pada 16 Agustus 2019];
- Spacey, John. (2019). *16 Examples of The Manufacturing Industry.* [diakses pada 22 Juni 2019];
- Economy Watch. (2010). *Manufacturing Industry.* [diakses pada 22 Juni 2019];
- Euronews. (2019). *What Are The Real Reasons Honda is Closing Its Factory in Swindon?* [Diakses pada 4 Oktober 2019]
- Fackler, Martin. (2012). *Declining as a Manufacturer, Japan Weighs Reinvention.* [diakses pada: 20 Juni 2019];
- Heijmans, Philip. (2019). *Sanctions Squeeze Myanmar's Economy.* [diakses pada 23 Mei 2019];
- Japan Times. (2018). *Japan Ranks Second in New Development Index that Puts Quality and Quantity of Life before Wealth.* [diakses pada: 1 April 2019];
- Myanmar Times. (2017). *Education Always a Major Focus for Japan's Bilateral Cooperation with Myanmar.* [diakses pada 23 Juli 2019];
- Myanmar Times. (2015). *First Foreign Bank to Open Branch in Yangon Says Long-Term View Is Key.* [diakses pada 16 Agustus 2019];
- CNBC Indonesia. (2019). *Lebih Tinggi dari Perkiraan, Ekonomi Jepang di Q1 Tumbuh 0,6%.* [diakses pada 31 Juli 2019];

- New York Times. (2019). *In a Surprise, Japan's Economy Grew in the First Quarter, Despite a Slowdown in China*. [diakses pada 1 Agustus 2019];
- Nikkei Asian. (2019). *Labor Shortage Drives More Bankruptcies in Japan*. [diakses pada 20 Juni 2019];
- Nippon.com. (2019). *Corporate Bankruptcies in Japan at 10-Year Low*. [diakses pada 20 Juni 2019];
- Reuters. (2018). *Japan, Short of Workers, Eyes Hiking Optional Pension Age Beyond 70*. [diakses pada 25 April 2019];
- South China Morning Post. (2013). *Abenomics Encourages Japanese Firms to Invest – Abroad*. [diakses pada 26 Agustus 2019];
- The Diplomat. (2014). *Japanese Banks Win Big in Myanmar*. [diakses pada 15 Agustus 2019];
- Wall Street Journal. (2015). *Two Japan Banks First Foreign Banks to Open Myanmar Branches*. [diakses pada 16 Agustus 2019];
- VOX. (2018). *Japan's Age Wave: Challenges and Solutions*. [diakses pada 14 April 2019];